

ABSTRAK

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI LAMPUNG DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Oleh

Khoirun Nasikhin

Setelah reformasi, terjadi perubahan paradigma pemerintahan yaitu dari sentralisasi menuju desentralisasi atau otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya dengan tujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah diikuti pula dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil termasuk didalamnya perimbangan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Salah satu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah dan ketergantungan kepada bantuan pusat yang seminimal mungkin. Alat untuk menganalisis kinerja keuangan daerah diantaranya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung, periode tahun 2001-2008. Obyek penelitian ini terdiri atas 8 Kabupaten dan 2 Kota. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio pertumbuhan PAD, dan rasio pertumbuhan pendapatan daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis komparatif, trend dan regresi linier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung masih rendah namun cenderung meningkat, kemampuan dalam merealisasikan PAD dikategorikan efektif namun cenderung menurun, rata-rata tingkat pertumbuhan PAD dan pertumbuhan pendapatan daerah adalah positif namun cenderung menurun. Selain itu PAD maupun Non-PAD memiliki pengaruh yang positif pada kemandirian suatu daerah, apabila penerimaan PAD dan Non-PAD meningkat akan meningkatkan pula kemandirian suatu daerah dan sebaliknya. Berdasarkan penelitian ini juga diketahui bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Kota lebih tinggi dari pada Pemerintah Kabupaten.

Kata Kunci: *Otonomi Daerah, APBD, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Pertumbuhan PAD dan Pendapatan Daerah.*